

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karimun dengan menggunakan indikator kinerja dari Agus Dwiyanto yang terdiri dari tingkat produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas belum berjalan dengan maksimal.

1. Produktivitas BPKPBPB Karimun dalam mencapai hasil yang sesuai dengan sasaran belum tercapai dengan baik. penyebab kurangnya produktivitas yang dihasilkan BPKPBPB Karimun karena program dan kegiatan tidak dapat direalisasikan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Program dan kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana karena status kelembagaan BPKPBPB Karimun yang belum jelas kedudukannya sehingga mengakibatkan anggaran yang diterima sangat terbatas. Program dan kegiatan yang terhambat memberikan pengaruh terhadap percepatan pengembangan kawasan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sehingga target pencapaian tidak bisa terselenggara dengan baik yang akhirnya akan berdampak terhadap kekalahan BPKPBPB Karimun dalam bersaing dengan kawasan bebas lainnya untuk menarik investasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Karimun.

2. Kualitas layanan BPKPBPB Karimun cukup baik. Perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan perijinan sudah baik dari segi kesopanan, kejujuran, dan kedisiplinan pegawai dalam memberikan layanan kepada masyarakat pengguna jasa layanan. Namun masih terdapat kekurangan dari bentuk layanan yang diberikan seperti infrastruktur yang tidak memadai dan pengembangan pariwisata yang tidak berjalan dengan baik sehingga menyebabkan kualitas layanan BPKPBPB Karimun menjadi tidak maksimal.
3. Responsivitas BPKPBPB Karimun sudah baik. Kemampuan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam merespon keluhan masyarakat dikatakan baik terbukti disaat keluhan yang disampaikan masyarakat terkait pengembangan kawasan untuk mempermudah kegiatan ekonomi di KPBPB Karimun melalui pembangunan jalan diterima dengan baik. keluhan tersebut kemudian direspon dengan memberikan solusi melalui upaya BPKPBPB Karimun dalam membangun jalan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengaruh perbaikan jalan tersebut memberikan kemudahan kepada masyarakat yang bekerja di kawasan PBPB dan juga investor sehingga dapat membantu masyarakat untuk bekerja dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
4. Responsibilitas BPKPBPB Karimun dalam melaksanakan program yang sesuai dengan visi dan misi maupun ketentuan yang berlaku belum berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan karena hasil yang didapatkan untuk mencapai visi misi belum sepenuhnya terlaksana. Hampir sebagian besar program yang direncanakan tidak terealisasi yang menyebabkan visi misi BPKPBPB

Karimun untuk menjadikan Kawasan Karimun sebagai pengelola kawasan industri matirim tidak dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Hal ini menyebabkan penilaian kinerja BPKPBPB Karimun berdasarkan indikator responsibilitas dinilai belum baik.

5. Akuntabilitas BPKPBPB Karimun belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan proses evaluasi melalui laporan kinerja yang dibuat oleh BPKPBPB Karimun belum sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB no 53 tahun 2014 mengenai petunjuk teknis pembuatan laporan kinerja. Selain permasalahan laporan yang belum sesuai standar, akuntabilitas BPKPBPB Karimun juga bermasalah terhadap keterbukaan informasi yang diberikan kepada masyarakat. Kurangnya transparansi menyebabkan pengetahuan masyarakat terhadap kinerja BPKPBPB Karimun menjadi terhambat yang menyebabkan aspek akuntabilitas menjadi tidak maksimal.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja BPKPBPB Karimun dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Karimun maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan pencapaian hasil dengan merealisasikan kegiatan yang lebih maksimal dari sebelumnya.
2. Membangun kawasan infrastruktur yang lebih baik untuk meningkatkan daya tarik investor.
3. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam memperbaiki kinerja agar tujuan pembentukan kawasan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

4. Meningkatkan kemampuan pegawai melalui pelatihan pembuatan laporan yang sesuai dengan standar aturan yang ditetapkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja BPKPBPB Karimun.
5. Meningkatkan pengelolaan website sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.